

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1 Pertambahan Jumlah Penduduk Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, khususnya pada daerah kota Yogyakarta. Dari data yang didapat pada tahun 2011 jumlah penduduk pada kota Yogyakarta 392.506 jiwa sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk di kota Yogyakarta mencapai 417.744 jiwa. (Badan Pusat Statistik Yogyakarta). Semakin meningkatnya penduduk di kota Yogyakarta maka kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat, kebutuhan akan tempat tinggal banyak datang dari golongan menengah kebawah. Namun seiring meningkatnya permintaan untuk tempat tinggal, lahan yang tersedia semakin sedikit di kota Yogyakarta. Dengan semakin sedikitnya lahan maka harga lahan juga semakin mahal, sehingga hunian vertikal adalah solusi yang tepat untuk mengatasi naiknya jumlah penduduk di kota Yogyakarta serta kebutuhan akan tempat tinggal.

1.2 Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang memiliki fungsi sebagai tempat bernaung, tempat berlindung, dan tempat beristirahat. Maka rumah seharusnya dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni baik secara fisik maupun secara kejiwaan.

Berikut adalah data mengenai kebutuhan, ketersediaan dan backlog perumahan di DIY dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

Regions	Housing Needs (unit)	Housing Stocks (unit)	Backlogging Houses	
			Unit	Share
Sleman	219.357	182.341	37.016	29
Kulon Progo	91.659	68.663	22.996	18
Yogyakarta	101.483	74.454	27.029	21
Bantul	119.212	182.647	11.861	9
Gunungkidul	194.508	92.196	27.016	21

Tabel 1 - 1 Data Backlogg Hunian Di Yogyakarta

Sumber : DPUP-ESDM DIY, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Yogyakarta hunian yang tersedia sebanyak 74.454 buah sedangkan peminat dari hunian sebanyak 101.483. Sehingga masih terdapat sebanyak 27.029 buah hunian yang belum terpenuhi kebutuhannya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka hunian vertikal adalah solusi untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan yang tinggi dari lahan yang terbatas.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bangunan perumahan dan permukiman memiliki persyaratan :

- Koefisien Dasar Bangunan maksimal 80%
- Koefisien Lantai Bangunan maksimal 1.5
- Koefisien Dasar Hijau 10%
- Jumlah lantai maksimal 3 lantai
- Garis Sempadan Bangunan minimal 3 meter
- Garis Sempadan Sungai 5 meter dari batas terluar sungai

Peraturan tersebut menjadi dasar acuan perancangan yang akan diterapkan pada Kampung Gampingan RW 11.

1.3 Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai (Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, 2015). Untuk kawasan bantaran sungai di Yogyakarta memiliki peraturan yang di atur dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 02 Tahun 2010 seperti pada uraian di bawah.

- Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau
- Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air
- Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi
- Penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2016 tentang Daerah Aliran Sungai memiliki peraturan sebagai berikut

- Mengarahkan bangunan menghadap ke sungai
- Mencegah penambahan bangunan baru
- Mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan sungai atau merusak kualitas air sungai
- Mencegah pembuangan air limbah secara langsung ke sungai
- Melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias
- Mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Kampung Gampingan RW 11 masih banyak terdapat rumah-rumah yang berdiri pada kawasan bantaran sungai yang seharusnya menjadi area hijau. Rumah-rumah yang berada di bantaran sungai juga dapat dikaatkan berkondisi kumuh pada beberapa bagian, serta belum memiliki fasilitas septictank sehingga mereka membuangnya ke sungai. Rumah-rumah yang berada di bantaran sungai juga menghambat pemasangan talud sungai, padahal talud sungai sangat penting untuk mencegah terjadinya longsor.

Pada kampung ini juga menjadi salah satu kawasan pengembangan program Pemprov DIY yaitu KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dengan program menata permukiman bantaran sungai berdasarkan 3M (Munggah, Mundur, Madep Kali) dan pengembangan ruang publik di bantaran sungai. Tetapi dalam Kampung Gampingan RW 11 belum ada penataan pada permukiman dan fasilitas pendukungnya.

1.4 Permukiman Kampung Gampingan RW 11, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta

Kampung Gampingan RW 11, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta terletak pada latitude $7^{\circ}47'59.37''S$ dan longitude $110^{\circ}21'16.19''E$, tepatnya berada di sebelah timur Gedung Jogja Nasional Museum dan berbatasan langsung dengan Sungai Winong pada sisi timur kampung. Sedangkan pada sisi utara berbatasan dengan Kampung Gampingan RW 10, sisi selatan berbatasan dengan Jalan K.H Ahmad Dahlan, sisi barat berbatasan dengan Jalan Prof. DR. Ki Amri Yahya. Kampung ini memiliki luas kurang lebih $26.059m^2$ yang dihuni oleh 1031 jiwa, serta tersebar dalam empat Rukun Tetangga yaitu 48, 49, 50, dan 51. Dengan banyaknya penghuni dalam

Kampung Gampingan RW 11 dapat dikatakan kampung ini memiliki kepadatan yang tinggi.



Gambar 1-1 Peta Kampung Gampingan RW 11
Diunduh dengan : Google Earth Pro

Rukun Tetangga	Jumlah	
	Kepala Keluarga	Jiwa
48	98	296
49	78	254
50	83	283
51	66	198
Jumlah	325	1031

Tabel 1 - 2 Data Penduduk Kampung Gampingan RW 11

Sumber : Data RW 11 Gampingan Agustus 2017

Hal tersebut disebabkan juga karena banyaknya masyarakat yang menginginkan lahan atau tempat tinggal yang terjangkau agar mereka tetap

dapat melanjutkan hidup di kota dan dapat berkompetisi dengan masyarakat lainnya.

Namun karena banyak yang berminat tinggal di Kampung Gampingan RW 11 maka yang terjadi pada kampung ini sangat padat dan menimbulkan beberapa permasalahan seperti, rumah-rumah sangat berimpitan satu dengan lainnya serta terdapat beberapa rumah berada tepat pada bantaran Sungai Winong karena tidak mendapatkan lahan lagi pada area yang lebih aman. Jalan kampung memiliki lebar jalan yang kurang memadai karena lebar jalan pada kampung ini didominasi dengan lebar 2.5 meter sampai dengan kurang dari 1 meter. Lahan terbuka hijau maupun non-hijau sangat sedikit karena pada Kampung Gampingan RW 11 telah didominasi bangunan untuk tempat tinggal para warga, dengan sedikitnya lahan terbuka hijau dan non-hijau mengakibatkan kurangnya wadah bagi masyarakat Kampung Gampingan RW 11 untuk melakukan kegiatan bersama. Selain hal tersebut, infrastruktur dan utilitas masih terdapat beberapa yang kurang memadai.

Dengan adanya permasalahan seperti yang telah disebutkan, maka diperlukan wadah bagi para masyarakat untuk mendapatkan kualitas hunian lebih baik berupa kampung vertikal yang menjembatani transisi antara hunian kampung horizontal dengan hunian vertikal berupa kampung vertikal dengan pendekatan *sustainable development* dengan aspek sosial budaya. Hal tersebut bertujuan agar para masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia yang salah satunya adalah hunian yang layak, mempertahankan keanekaragaman. Serta Pengembangan pada Kampung Gampingan RW 11 bertujuan agar dapat memenuhi permintaan hunian pada masa sekarang dan pada masa mendatang.

1.5 Kebutuhan Pembangunan Permukiman Yang Berkelanjutan

Sustainable development adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. (Budiharjo dan Sudjarto, 1999)

Menurut Doxiadis dalam Kuswartojo, T., & Salim, S. (1997), permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lingkungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan tiga unsur: alam (tanah, air, udara), lingkungan (shell) dan jaringan (networks), sedang isinya adalah manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar dan di alam itulah, diciptakan lingkungan (rumah, gedung dan lainnya) sebagai tempat manusia tinggal serta menjalankan fungsi lain.

Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman menurut Joko Kirmanto (2007) -Menteri Pekerjaan Umum- diartikan sebagai pembangunan permukiman termasuk di dalamnya pembangunan kota secara berkelanjutan sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Intinya pembangunan permukiman yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas permukiman sebagai wadah terdiri dari beberapa unsur yaitu alam, lingkungan, dan jaringan. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dapat berkelanjutan maka manusia sebagai isinya juga tidak dapat melanjutkan hidup dengan baik. Maka diperlukan permukiman yang berkelanjutan agar dapat mendukung segala keperluan manusia dan

masyarakat pada masa sekarang serta masa mendatang tanpa merusak lingkungan termasuk sistem sosial budaya dalam permukiman tersebut.

Maka permukiman berkelanjutan diperlukan sebagai sebuah bentuk keberlanjutan dalam berbagai aspek yaitu seperti memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang yang terwadahi dalam bentuk permukiman.

1.5.1 Aspek Sosial Budaya Dalam Kampung Vertikal

Pada hakekatnya, manusia tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, meliputi nilai, pandangan hidup, keyakinan, kebiasaan, serta norma yang dianut sebagai ketetapan yang sudah ditentukan oleh suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan tadi akan mempengaruhi pola pikir, lingkungan fisik, dan setiap tindakan yang diambil oleh manusia. Hal ini dikarenakan dalam kebudayaan terkandung hal-hal yang berkaitan dengan persepsi manusia terhadap kelompok dan lingkungannya dimana persepsi tersebut kemudian akan diproyeksikan ke dalam suatu perwujudan tertentu (Sumaatmaja, 1996). Kemudian, Koentjaraningrat (1981) menspesifikasikan perwujudan kebudayaan menjadi tiga kelompok, yaitu wujud ide berupa gagasan, nilai, serta norma; wujud sistem sosial meliputi pola perilaku manusia dalam masyarakat; dan wujud fisik berupa benda-benda hasil karya manusia.

Arsitektur sebagai hasil karya manusia terindikasi dapat merepresentasikan kebudayaan suatu masyarakat yang berpedoman pada nilai, pandangan hidup, kebiasaan, serta keyakinan mereka. Rumah yang merupakan produk arsitektur dianggap mampu menggambarkan sistem dan nilai kebudayaan penghuni yang kemudian dimanifestasikan dalam perwujudannya (Babu dan Kuttiah, 1996). Hal tersebut menunjukkan setiap

perwujudan yang terjadi pada rumah akan mendapat pengaruh dari kebudayaan penghuni yang terlibat dalam proses pembentukannya.

Berikut adalah beberapa unsur budaya menurut C. Kluckhohn:

1. Sistem Religi (Sistem Kepercayaan), sistem religi yaitu suatu keyakinan yang dipercayai benar-benar ada. Unsur sistem religi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Sistem religi ataupun sistem kepercayaan berfungsi mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta.
2. Sistem Pengetahuan, unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mempunyai fungsi untuk memenuhi keingintahuan manusia terhadap suatu ilmu. Manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sistem pengetahuan.
3. Sistem Teknologi (sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia), sistem teknologi membahas mengenai peralatan dan juga perlengkapan macam-macam kebutuhan manusia yang digunakan untuk hidup. Teknologi merupakan suatu cara ataupun teknik dalam memproduksi peralatan dan juga perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Sistem Kemasyarakatan (sistem sosial/kekerabatan), unsur yang keempat yaitu unsur kemasyarakatan. Unsur ini merupakan unsur pewarisan budaya yang sangat penting dalam suatu struktur sosial. Unsur ini menghitung suatu garis keturunan dari hubungan perkawinan dan juga hubungan darah.
5. Sistem Ekonomi dan Mata Pencarian, Cara suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan juga termasuk dalam salah satu dari tujuh unsur kebudayaan. Hal ini tergantung pada kondisi lingkungan tempat hidup suatu masyarakat.

Masyarakat yang hidup dipinggir pantai akan berprofesi sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang hidup didaratan akan berprofesi sebagai petani.

Namun setelah revolusi industri sampai saat ini, jenis mata pencaharian telah beragam jenis dan bentuknya. Terutama pada masyarakat urban. Tidak hanya bertani dan nelayan. Masyarakat perkotaan dapat memilih jenis dan bentuk pekerjaan yang ia mau. Tergantung pada keterampilan dan kemampuan yang ia miliki.

6. Bahasa, bahasa merupakan suatu unsur budaya yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, baik secara lisan, tulisan, maupun secara isyarat.
7. Kesenian, Kesenian merupakan unsur yang terakhir yang terfokus pada nilai keindahan yang tercipta dari ekspresi manusia akan keindahan yang tersirat pesan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas manusia tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, meliputi nilai, pandangan hidup, keyakinan, kebiasaan, serta norma yang dianut sebagai ketetapan yang sudah ditentukan oleh suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan tadi akan mempengaruhi pola pikir, lingkungan fisik, dan setiap tindakan yang diambil oleh manusia. Seperti misalnya dalam arsitektur sebagai hasil karya manusia terindikasi dapat merepresentasikan kebudayaan suatu masyarakat yang berpedoman pada nilai, pandangan hidup, kebiasaan, serta keyakinan mereka.

Sehingga dalam proses pembentukan kampung vertikal pada Kampung Gampingan RW 11 juga akan mendapatkan pengaruh dari kebudayaan warga Gampingan yang telah berlangsung secara turun temurun. Untuk dapat mengetahui kebiasaan bersosial dan berbudaya para warga Kampung Gampingan RW 11 maka dalam proses perancangan Kampung Vertikal

Gampingan menggunakan metode partisipatif desain dengan tujuan agar para warga Kampung Gampingan RW 11 dapat memberikan masukan atau ide terhadap perencanaan perancangan Kampung Vertikal yang akan mereka tempati. Serta dengan menggunakan metode partisipatif desain diharapkan warga dapat memberikan gambaran bagaimana mereka biasanya menjalani hidup pada kampung horizontal dengan maksud agar desain yang dihasilkan pada Kampung Vertikal Gampingan dapat menjembatani peralihan dari bermukim pada kampung horizontal ke dalam kampung vertikal. Karena pada hunian vertikal yang telah ada di Kota Yogyakarta sangat minim ruang-ruang yang mendukung aktifitas yang biasanya dilakukan oleh warga dalam kampung horizontal, sehingga para warga enggan untuk pindah ke dalam hunian vertikal, karena dengan tinggal pada hunian vertikal dapat mengubah cara bermukim mereka.

2. Permasalahan

2.1 Permasalahan Umum

Meningkatnya jumlah penduduk di kota Yogyakarta menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat, namun seiring meningkatnya permintaan akan tempat tinggal, lahan yang tersedia di kota Yogyakarta semakin sedikit. Sedangkan rumah atau hunian merupakan kebutuhan utama bagi manusia sebagai tempat bernaung, tempat berlindung, dan tempat beristirahat.

Seperti yang terjadi pada Kampung Gampingan RW 11, di kampung ini permukiman menjadi sangat padat karena banyak para pendatang yang ingin tinggal pada kampung ini, akibatnya lahan terbuka yang tersedia pada Kampung Gampingan RW 11 semakin mengecil. Permukiman yang awalnya berada pada tempat yang aman dari bantaran Sungai Winong kini telah bergeser hingga ke bantaran sungai. Padahal dalam peraturan daerah area bantaran sungai tidak dapat di fungsikan sebagai area hunian karena

dapat merusak lingkungan serta membahayakan bagi yang tinggal di bantaran sungai.

Sehingga pada area tersebut membutuhkan infrastruktur hunian vertikal yang dapat menampung kebutuhan hunian sekarang maupun pada masa mendatang dengan menggunakan lahan yang minimal. Namun para warga Kampung Gampingan RW 11 enggan pindah ke dalam hunian vertikal seperti yang telah ada di Kota Yogyakarta, karena dalam rusunawa yang telah ada di Kota Yogyakarta sangat minim area yang dapat dijadikan ruang untuk bersosial dan berbudaya antar sesama, maka dari itu diperlukan hunian vertikal berupa Kampung Vertikal Gampingan yang dapat menjembatani kebiasaan bermukim, bersosial dan berbudaya pada kampung horizontal ke dalam hunian vertikal.

2.2 Permasalahan Khusus

Perancangan hunian vertikal dengan tema kampung vertikal, bertujuan untuk menjembatani transisi antara hunian horizontal dengan hunian vertikal. Selain dapat menjembatani antara hunian horizontal dengan hunian vertikal, kampung vertikal dalam Kampung Gampingan RW 11 juga harus mampu berkelanjutan secara sosial dan budaya dengan cara merespon perilaku atau kebiasaan warga Kampung Gampingan dalam bermukim dan bersosial budaya. Untuk dapat merespon perilaku atau kebiasaan para warga Kampung Gampingan RW 11 maka diperlukan ruang-ruang sosial yang dapat dijadikan warga untuk beraktifitas layaknya pada kampung horizontal, sehingga para warga yang tinggal pada Kampung Vertikal Gampingan dapat berkelanjutan secara sosial dan budaya seperti yang telah dilakukan selama ini.

3. Tujuan Perencanaan

Merancang sebuah hunian vertikal dengan pendekatan *sustainable development* dengan aspek sosial budaya pada Kampung Gampingan RW 11 yang dapat menjembatani cara tinggal masyarakat dalam kampung horizontal ke dalam hunian vertikal, serta dapat merespon kegiatan dan kebiasaan para masyarakat yang biasa dilakukan dalam kampung horizontal.

4. Sasaran

1. Mampu mendesain hunian vertikal sesuai dengan peraturan dan standar mengenai hunian vertikal atau rumah susun.
2. Mampu mendesain hunian vertikal dengan pendekatan *sustainable development* berdasarkan aspek sosial budaya.

5. Metode Perancangan

Untuk menghasilkan kampung vertikal di Gampingan RW 11 yang dapat mewadahi dengan baik para masyarakat Kampung Gampingan dalam berkelanjutan secara sosial dan budaya maka dalam perancangan ini menggunakan metode partisipatif desain.

Partisipatif desain menurut Wrihatnolo dan Dwidjowoyoto (1996) adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah. .Dalam partisipatif desain terdapat beberapa aspek mengapa dibutuhkan partisipatif desain dalam perancangan seperti yang dituliskan oleh Conyers, 1991:

1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap

masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau proram pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Berikut adalah beberapa manfaat perencanaan partisipatif desain:

1. Sebagai pendorong masyarakat dalam merubah kebutuhan masyarakat dari keinginan (felt need) menjadi nyata (real need), sehingga Pelaksanaan program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
2. Perencanaan dapat menjadi stimulasi terhadap masyarakat, untuk merumuskan dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
3. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya serta kearifan lokal, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu berkesinambungan.
5. Memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan, sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat.

6. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
7. Memberikan transparansi akibat terbuka lebarnya informasi dan wewenang.
8. Memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi mitra dalam perencanaan.

Sumber : Bagas Imamsyah,2015

Hal tersebut bertujuan agar dalam proses perancangan para masyarakat dapat memberikan usulan mengenai apa saja yang diperlukan dalam hunian vertikal agar para warga dapat tinggal dan berkelanjutan secara sosial dan budaya, serta dengan partisipatif desain para warga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi keperluan bersama dalam perancangannya. Dari sisi perancang dapat mengetahui apa saja yang diperlukan dalam perancangan kampung vertikal agar dapat menjembatani peralihan bermukim dari kampung horizontal ke dalam hunian vertikal dan berkelanjutan secara sosial dan budaya. Berikut adalah langkah-langkah metode pemecahan masalah yang digunakan :

5.1 Pengumpulan Data

a. Data Studi Kasus

Kajian bangunan kampung vertikal di Kota Yogyakarta

1. Jurnal Tipologi Rumah Susun Di Kota Yogyakarta – Hestin Mulyandari 2012
Analisa tipologi dari aspek Physical control yaitu (1) kontrol terhadap iklim, rata-rata rusunawa tidak memiliki tritisan yang memadai sehingga tampias hujan; (2) masalah sampah dan saluran air kotor yang mampet, menimbulkan bau menyengat; (3) penutup atap menggunakan genteng metal yang tidak berpasir sehingga

panas di siang hari untuk yang tinggal di lantai teratas, dan apabila hujan terdengar suara keras dari air hujan. Analisa dari functional frame (1) rata-rata pola bangunan single loaded; (2) dalam satu rusun memiliki besaran unit yang sama; (3) ketinggian lantai untuk rusun Juminahan dan Jogoyudan 3 m, sedangkan rusun Cokrodirjan 2,8 m.

2. Jurnal Communal Living Di Rumah Susun, Studi Kasus Rusunawa Jogoyudan Yogyakarta – Oktalina Mayasari 2010

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sistem ruang dari hunian horizontal ke vertikal tidak mengubah kegiatan bersama yang dilakukan penghuni rumah susun. Penghuni rumah susun melakukan penyesuaian perilaku terhadap ruang-ruang yang ada di rumah susun. Communal living yang terjadi di rumah susun tersentralisasi di lantai 1 (lantai bawah) sesuai dengan letak ruang-ruang yang memfasilitasi kegiatan bersama. Penelitian ini merekomendasikan agar pembangunan rumah susun seharusnya memperhatikan kebutuhan penghuni akan adanya ruang bersama. Rumah susun sebaiknya dibangun di lokasi yang berdekatan dengan lokasi asal sasaran penghuni agar tetap menghidupkan communal living yang merupakan karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Faktor Penyebab Rendahnya Minat Warga Kampung Juminahan Untuk Menghuni Rumah Susun Graha Bina Harapan Tegalpanggung Yogyakarta – Atqon Adi Sasmito 2014

Penelitian ini melibatkan 92 responden yang merupakan warga kampung juminahan dan RW 13 yang pernah ditawarkan tinggal di Rusun Graha Bina Harapan. Terdapat tujuh faktor yang memiliki hubungan terhadap minat warga untuk menghuni rumah susun. Salah satu faktor yang memiliki hubungan dan memiliki pengaruh

paling kuat adalah faktor yang berasal dari kondisi rumah susun itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas bangunan rumah susun dirasa masih kurang dan tidak jauh berbeda dengan bangunan di pemukiman kumuh. Sehingga untuk pembangunan rumah susun ke depan pemerintah perlu memperhatikan kualitas bangunan rumah susun agar tidak timbul persepsi di masyarakat bahwa kualitas bangunan rumah susun tidak jauh berbeda dengan pemukiman kumuh.

b. Data Literature

- Studi mengenai kampung vertikal
- Studi mengenai unit kamar
- Standar gubahan masa
- Kriteria kampung vertikal
- Sistem penghawaan dan pencahayaan pasif
- Layout tata ruang
- Studi tentang *sustainable development* berdasarkan aspek sosial budaya
- Tabel kegiatan warga
- Tabel usulan warga

c. Data Observasi dan Survei

- Survei lokasi perancangan, meliputi kawasan eksisting pada Kampung Gampingan RW 11
- Survei mengenai preseden tentang kampung vertikal

5.2 Penelusuran Persoalan

5.2.1 Tahap Analisa

Pada tahap Analisa ini data-data yang didapatkan akan diklarifikasi sesuai dengan tipologi dan tema.

- Membandingkan dan mengkomparasi data sehingga menghasilkan suatu konsep rancangan
- Pembuatan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan

5.2.2 Tahap Sintesa

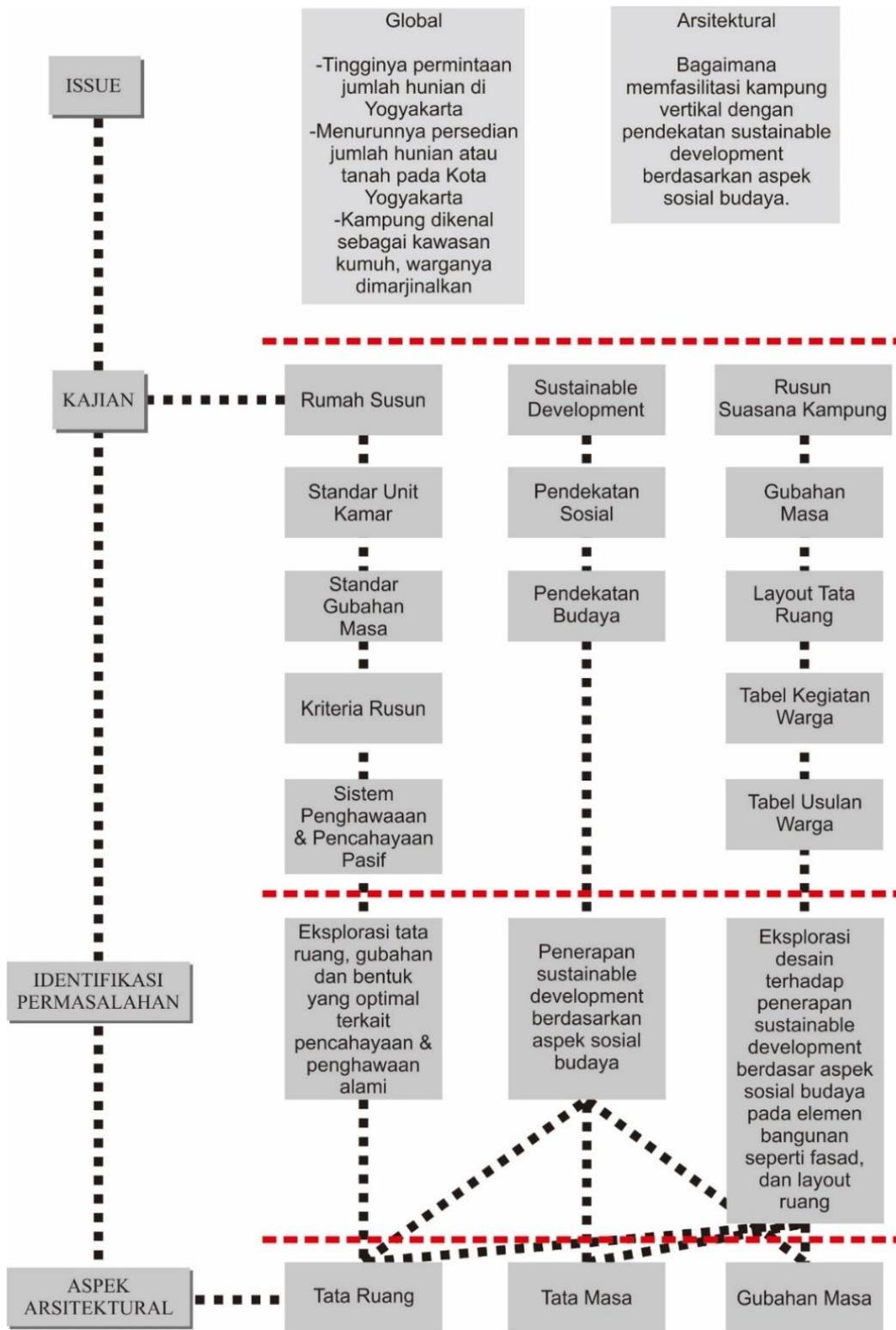
Merupakan tahap perumusan konsep dengan mengambil kajian dan hasil komparasi dari tahapan sebelumnya.

5.3. Pemecahan Persoalan

- I. Memunculkan masalah yang didapat dari isu hasil survei lapangan berupa tabel kebutuhan dan tabel kegiatan warga dan studi literatur yang telah dilakukan.
- II. Masalah dipecahkan dengan cara menganalisis isu dan dijabarkan serta di komparasi, kemudian disimpulkan yang kemudian hasilnya adalah konsep rancangan.

5.4 Tahapan Pengujian

Pengujian desain rancangan kampung vertikal pada Kampung Gampingan RW 11 melalui checklist dari tabel kebutuhan warga, tabel kegiatan warga, dan parameter kajian sintesis teori.



6. Studi Kepustakaan

6.1 Hunian Vertikal dan Retail di Kawasan Gampingan, Yogyakarta

Muhammad Fiqron Nasywan

- **Penekanan** : Penekanan konsep arsitektur berkelanjutan pada hunian vertikal dilihat dari aspek efisiensi dan material.
- **Persamaan** : Pembuatan hunian vertikal pada Kawasan Gampingan, serta menggunakan pendekatan arsitektur berkelanjutan
- **Perbedaan** : Selain berfungsi sebagai hunian vertikal juga berfungsi sebagai retail

6.2 Kampung Vertikal di Ngampilan Bantaran Sungai Winong, Yogyakarta

Hani Verandika

- **Penekanan** : Penekanan konsep dari hunian vertikal dengan menekankan suasana kampung pada rumah susun sebagai tempat tinggal sekaligus mewadahi aktifitas interaksi masyarakat melalui fasilitas pengolahan sampah dengan pendekatan arsitektur adaptif lingkungan.
- **Persamaan** : Hunian vertikal dengan menekankan suasana kampung.
- **Perbedaan** : Perancangan hunian vertikal dengan pendekatan arsitektur adaptif.